

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI MASYARAKAT

SUKU SERAWAI MELAKUKAN PEMBUKAAN HUTAN BELUKAR

MENJADI LAHAN KEBUN DI KECAMATAN PINO RAYA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Budaya

Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai - nilai penting dan fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebut harus dijaga agar tidak luntur atau hilang sehingga dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi berikutnya.

Budaya secara umum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. *Budaya Daerah* adalah suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut. Budaya daerah ini muncul saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama sehingga itu menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk - penduduk yang lain. Budaya daerah sendiri mulai terlihat berkembang di Indonesia pada zaman kerajaan - kerajaan terdahulu. Itu dapat dilihat dari cara hidup dan interaksi sosial yang dilakukan masing-masing masyarakat kerajaan di Indonesia yang berbeda satu sama lain. Dari

bermacam-macam budaya daerah tersebut maka munculah sesuatu yang disebut Budaya Nasional

2. *Budaya Nasional* adalah gabungan dari budaya daerah yang ada di Negara tersebut. Itu dimaksudkan budaya daerah yang mengalami asimilasi dan akulturasi dengan daerah lain di suatu Negara akan terus tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari Negara tersebut. Misalkan daerah satu dengan yang lain memang berbeda, tetapi jika dapat menyatukan perbedaan tersebut maka akan terjadi budaya nasional yang kuat yang bisa berlaku di semua daerah di Negara tersebut walaupun tidak semuanya dan juga tidak mengesampingkan budaya daerah tersebut. Contohnya Pancasila sebagai dasar negara, Bahasa Indonesia dan Lagu Kebangsaan yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 12 Oktober 1928 yang diikuti oleh seluruh pemuda berbagai daerah di Indonesia yang membulatkan tekad untuk menyatukan Indonesia dengan menyamakan pola pikir bahwa Indonesia memang berbeda budaya tiap daerahnya tetapi tetap dalam satu kesatuan Indonesia Raya dalam semboyan “*bhinneka tunggal ika*”.

Ada suatu pepatah bijak mengatakan :

“ *Suatu Negara tidak akan menjadi Negara yang besar jika tidak mengetahui jati diri dari budaya Negara tersebut* “

Hukum adat merupakan abstraksi dari pola-pola yang bersifat umum, yang merupakan konkretisasi dari nilai-nilai social budaya yang terwujud dan terbentuk dari budaya suatu masyarakat. Hukum adat yang merupakan konkretisasi nilai-nilai social budaya itu, merupakan pencerminan cara berfikir masyarakat yang bersangkutan, sehingga di mana ada masyarakat di situ ada hukum adat.⁵⁸

Dalam perspektif sosiologi dan antropologi, kebudayaan merupakan salah satu modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya, sehingga faktor modal sosial menjadi salah satu unsur penting, termasuk dalam membuka tanah atau pembukaan hutan belukar.⁵⁹ Perwujudan perilaku pembukaan hutan tersebut beriring dengan eksistensi sistem ide, gagasan, norma, kelembagaan, dan nilai-nilai yang hidup dan terpelihara secara turun temurun. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh *Ra'un* dan *Sulas* yaitu masyarakat Tanjung Aur II yang bekerja sebagai petani di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

Masyarakat Tanjung Aur yang pada umumnya bekerja sebagai petani Adapun yang melatarbelakangi masyarakat Suku Serawai pada umumnya melakukan pembukaan hutan belukar di Desa Tanjung Aur II ini yaitu yang mana karena faktor alam. Di mana alam yang luas dengan persediaan makanan yang cukup membuat masyarakat ini ingin memanfaatkannya seperti melakukan

⁵⁸ Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, Op Cit., Halaman 35.

⁵⁹ Purwadi Eka Tjahjono, Panji Suminar, dan achmad Aminudin, Op Cit., Halaman 2.

cocok tanam untuk dinikmati hasilnya atau bahkan dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli keperluan rumah tangga. Menjadi masyarakat yang tinggal di lokasi pedesaan dan pendidikan yang hanya sebatas Sekolah Dasar (SD) menurut *Ra'un*, bertani atau berkebun adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Adapun kebun yang ditanaminya adalah .

B. Sistem Kekerabatan

Interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya dalam bermasyarakat juga melatarbelakangi dalam pembukaan hutan menjadi lahan kebun menurut hukum adat serawai di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ini, seperti pendapat dari *Warsito* selaku Sekretaris Desa Tanjung Aur II “kami diajak jemo buka *gimbau*” maksudnya disini adalah dimana individu satu mengajak atau mempengaruhi individu yang lainnya untuk melakukan hal yang sama yaitu melakukan pembukaan hutan belukar ini menjadi lahan kebun sehingga hal ini secara terus menerus menjadi suatu kebiasaan dari anggota masyarakat lainnya.

Apabila ditelaah terhadap hukum adat, berarti pula melakukan telaah terhadap cara hidup, pandangan hidup serta struktur kejiwaan yang merupakan refleksi cara berfikir dan struktur kejiwaan suatu masyarakat yang menjadi pendukung hukum adat itu.

C. Faktor Pendidikan

Dengan pendidikan yang hanya sebatas tamatan Sekolah Rakyat (SR) dan/atau Sekolah Dasar (SD), membuat masyarakat Desa Tanjung Aur II ini mempunyai suatu batasan untuk mencari pekerjaan lainnya seperti menjadi karyawan di perusahaan swasta. Hal ini juga dikemukakan oleh *Sulas*, yang mana ia juga hanya berpendidikan sebatas sekolah dasar. Sehingga tidak ada pilihan lain selain dari menjadi petani.

D. Keadaan lokasi yang jauh dari Kota

Dari hasil wawancara dengan *Warsito*, keadaan lokasi yang jauh dari Kota ini, membuat masyarakat Tanjung Aur II sulit untuk mencari pekerjaan yang lainnya, hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas baik dari desa maupun dari masyarakat Tanjung Aur II sendiri seperti tidak adanya angkutan umum yang melintas dari desa Tanjung Aur II menuju ke Kota, begitu juga dengan kendaraan pribadi yang masih sulit untuk dimiliki. Sedangkan dengan bertani, masyarakat Tanjung Aur II ini tidak harus memikirkan keadaan dimana mereka harus menempuh jarak yang jauh atau kurangnya fasilitas. Masyarakat Tanjung Aur II ini cukup menjual hasil kebunnya di tengkulak-tengkulak yang ada di sekitar wilayah Desa yang tidak jauh dari kebunnya.

Untuk menuju ke Kecamatan, masyarakat Tanjung Aur II ini harus menempuh jarak 18 Km. Sehingga keadaan seperti ini jugalah yang melatarbelakangi masyarakat Tanjung Aur II ini khususnya untuk memilih melakukan

pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

E. Faktor Ekonomi

Menurut *Taswin Suhadi* yaitu Kepala Desa Tanjung Aur II, yang melatar belakangi masyarakat Desa Tanjung Aur II melakukan pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun adalah karena adanya tuntutan ekonomi. dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya masyarakat Desa Tanjung Aur II ini harus bekerja dari mulai membuka hutan belukar menjadi lahan kebun kemudian mengelolanya secara kontinu sehingga hasilnya pun dapat dinikmati untuk kebutuhan ekonomi. Tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, namun hasil dari kebun yang dikelola oleh masyarakat Tanjung Aur II ini juga digunakan untuk kebutuhan sekolah. Adapun pendapatan yang didapat dari hasil bertani ini yaitu sekitar Rp. 1.500.000 rupiah per bulannya. Seperti halnya ini juga sependapat dengan *Warsito, Sulas*, dan *Ra'un*.

F. Adanya Pengakuan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Serawai

Menurut *Sulas* yang bekerja sebagai petani, membuka hutan belukar adalah salah satu cara dimana orang-orang dapat memiliki tanah atau kebun. *amondak tanah, bukalah gimbau* (jika ingin memiliki sebidang tanah, bukalah hutan belukar) karena hutan yang mereka kelola ini dianggap adalah suatu warisan dari nenek moyang yang dapat dimanfaatkan dengan ketentuan, tanah tersebut bukan milik orang lain atau tidak mengganggu kepentingan umum. Untuk mengetahui bahwa hutan belukar yang akan mereka buka sehingga akan menjadi

suatu lahan kebun nantinya, yaitu dengan cara memperhatikan tanda-tanda atau batasan-batasan yang mendakan bahwa hutan tersebut milik orang lain, misalnya adanya pohon durian, dimana pohon durian itu tumbuh bukan dengan sendirinya, melainkan ada yang menanamnya yaitu si pemilik tanah (yang pertama kali membuka hutan).

Dengan melakukan pembukaan hutan belukar dan mengelolanya sehingga hutan tersebut menjadi suatu lahan kebun yang dapat dinikmati hasilnya atau mempunyai nilai ekonomi, lambat laun kebun tersebut menurut hukum adat serawai telah menjadi milik si pembuka hutan belukar tersebut. Dengan adanya pengakuan hak atas tanah ini jugalah yang mendorong masyarakat Tanjung Aur II berkeinginan untuk melakukan pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut Hukum Adat Serawai.

BAB V

PROSES PEMBUKAAN HUTAN BELUKAR MENJADI LAHAN KEBUN MENURUT HUKUM ADAT SERAWAI DI KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Pembukaan Tanah (Hutan Belukar) Menurut Hukum Adat Serawai

Dari hasil wawancara di lapangan pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2014, Pukul 13.45 WIB, di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan menurut *Warsito* adapun acuan yang dianggap benar, mulia dan dijunjung tinggi, yang digunakan oleh masyarakat Suku Serawai khususnya masyarakat Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam berkebun adalah Undang-Undang Simbur Cahaya.

Adapun ketentuan menurut Undang-Undang Simbur Cahaya ini dalam kaitannya dengan pelestarian hutan, Bab II tentang Aturan Marga Pasal 25 ini yaitu menyebutkan bahwa “tidak sembarang menebang pohon tanpa seizin pasirah. Khususnya pohon klutum, kulim, dan tembesu”.

Pasal 25

Tidak diizinkan menebang batang : kelutum, unglen, kulin dan tembesu, djika tiada dengan izin jang berkuasa (pasirah).

Dalam hal ini berarti setiap masyarakat yang akan melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan wilayah hutan, baik itu melakukan

pembukaan hutan belukar maupun memanfaatkan atau menikmati hasil hutan, maka masyarakat tersebut harus atas izin yang berkuasa yaitu pasirah di marga atau dusun setempat. Selain itu ada beberapa ketentuan jenis pohon yang diizinkan untuk ditebang atau ada pengecualian dari pohon-pohon tersebut.

Apapun yang menjadi suatu keputusan dari yang berkuasa (pasirah) adalah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, meski dalam pelaksanaannya keputusan ini tidak tertulis atau secara lisan.

Beberapa ketentuan atau aturan masyarakat Serawai dalam berkebun atau berladang menurut Undang-Undang Simbur Cahaya Pasal 20 dan 21 Bab III tentang Aturan Dusun dan Berladang yaitu :

Pasal 20

Djika ada orang membakar (ketika membuat) ladang, lantas tanaman orang lain, seperti: durian, kelapa, sirih dan lain-lain ikut terbakar disebabkan orang yang membakar ladang itu kurang hati-hati, maka orang yang membakar ladang itu dikenakan denda dari 6 ringgit sampai 12 ringgit dan harus mengganti harga tanaman yang telah terbakar itu dengan harga yang patut.

Sewaktu orang akan membuat ladang atau kebun, terlebih dahulu kayu-kayu yang besar ditebang, kemudian dalam masa kira-kira seminggu lalu dibakar. Apabila dalam melakukan pembakaran kayu-kayu tersebut, ada ketidaksengajaan dikarenakan kurang hati-hati dari seorang yang akan melakukan pembukaan hutan belukar tersebut sehingga mengakibatkan tanaman orang lain juga ikut terbakar, maka yang membakar tersebut dikenakan denda

sebesar 6 ringgit hingga 12 ringgit serta mengganti semua tanaman tersebut dengan harga yang sewajarnya.

Pasal 21

Djika ada orang membakar ladang dekat kebun orang jang batasnja sudah ditentukan menurut patutan orang jang punja kebun, dan kebun itu lantas terbakar pula, maka jang membakar ladang itu tak perlu mengganti kerugian apapun.

Jika dalam membakar hutan belukar yang batasnya sudah ditentukan, namun dalam melakukan pembakaran tersebut kebun orang lain juga terbakar maka yang melakukan pembakaran tersebut tidak perlu melakukan kerugian apapun.

Pasal 30

Djika seseorang dusun bertemu dengan kaju bakal **sialang** (sebatang pohon besar jang disarangi empat atau 5 kesatuan lebah) di dalam watas dusunnja, maka bolehlah ia menebas hutan sekeliling batang sialang itu, dan batang ditebasnja, belumlah boleh ia mengakui bahwa itu batang sialang itu ia jang empunja.

Dalam melakukan pembukaan hutan belukar, masyarakat setempat tidak diperbolehkan untuk menebang kayu yang disarangi oleh lebah. Meskipun kayu yang disarangi lebah tersebut berada di wilayah ladang atau kebunnya, namun si pemilik kebun tidak boleh mengakui bahwa itu adalah miliknya.

Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya juga diatur bagi masyarakat yang bukan asli setempat untuk dapat melakukan pembukaan hutan belukar,

sebagaimana diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 Bab III tentang Aturan Dusun dan Berladang.

Selain masyarakat atau penduduk asli, masyarakat luar pun dapat melakukan hal yang sama dengan penduduk asli yaitu melakukan pembukaan hutan belukar dimana terdapat pada Pasal 27 Bab III tentang Aturan Dusun dan Berladang, dengan ketentuan marga asing harus meminta izin kepada yang berkuasa yaitu pasirah dan masyarakat luar (marga asing) tersebut juga harus membayar uang sewa bumi. Jika tidak meminta izin dan membayar uang sewa tersebut, maka si pembuka hutan belukar tersebut akan dikenakan denda sebesar 6 ringgit, karena dianggap mencuri hutan.

Pasal 27

Djika seseorang hendak berladang dimarga asing, hendaklah ia minta izin pada pasirahnja dan ia harus membajar sewa bumi pada jang punja tanah seperti telah diterangkan oleh jang berkuasa. Dan jang melanggar adat ini dikenakan denda 6 ringgit (**maling utan** namanja).

Apabila masyarakat atau marga asing yang telah membuka ladang atau kebun di marga asing (wilayah orang lain) tersebut ingin kembali lagi ke marga asalnya, maka semua tanaman dan hasil yang didapat harus dikembalikan kepada marga dimana tempat si pembuka hutan belukar tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Bab III tentang Aturan Dusun dan Berladang.

Pasal 28

Djika seseorang jang menumpang bertalang atau berkebun didusun atau marga lain, hendak kembali kedusunnja, maka segala tanamannja harus dikembalikannja kepada jang empunja tanah.

Terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh marga asing yang menumpang berladang atau berkebun di marga asing (wilayah orang lain). Seperti yang tertera dalam Pasal 29 Bab III tentang Aturan Dusun dan Berladang, apabila marga asing yang mendapatkan gading atau cula badak yang sudah mati, maka gading atau cula tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu 2 bagian untuk orang yang mendapatkannya dan 1 bagian untuk orang yang mempunyai ladang atau kebun. Meskipun marga asing itu sudah membayar uang sewa ladang atau kebun, namun bukan berarti marga asing itu dapat melakukan semua aktifitas yang terjadi di atas tanah tersebut.

Pasal 29

Djika ada seseorang jang menumpang mendapat gading atau **tjula** badak jang sudah mati maka gading (tjula) itu dibagi tiga, 2 bagian untuk orang jang mendapatkannja dan 1 bagian untuk orang jang empunja tanah, tetapi djika ada orang menumpang membunuh badak maka gading dan tjula dia sendirilah jang empunja.

Masa lampau bangsa ini banyak menyimpan kearifan lokal yang menjadi anutan dan aturan tindak dalam masyarakat. Secara sederhana kearifan lokal mengacu pada kepercayaan, aturan tindak, dan adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Kearifan lokal oleh berbagai komunitas selalu dianggap benar, mulia, dan memuat tuntunan. Kearifan lokal yang dianggap benar, mulia, dan dijunjung tinggi ini meliputi hampir semua aspek kehidupan tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Kearifan lokal ini sering bergantian disebut sebagai pengetahuan atau nilai tradisional, *local wisdom* atau *local genius*.

Secara sederhana pengetahuan lokal diartikan sebagai tradisi yang hidup di masyarakat yang telah lama diturunkan, dan dipraktikkan dari generasi ke generasi yang menjadi ajaran atau referensi dalam kehidupan masyarakat. Pengetahuan lokal ini termuat dalam cerita rakyat, nyanyian, legenda, dan ritual. Ada yang mengatakan *local genius* merupakan *cultural identity*, sebuah identitas budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap budaya asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. *Local genius* telah berjalan lama dan sampai sekarang masih terus bertahan.

Ciri-cirinya antara lain mampu bertahan terhadap budaya luar, kemampuannya mengakomodasi budaya-budaya luar, memberi arah pada perkembangan budaya, dan mempunyai kemampuan mengendalikan. Kearifan lokal yang merupakan hasil budaya masa lalu ini sampai sekarang masih terus diterapkan dari satu daerah ke daerah lainnya.

Kearifan lokal ada yang mengatur lingkungan (hutan), pengelolaan laut, pengorganisasian irigasi-pertanian, kesenian tradisional dan kuliner tradisional,

serta kerukunan beragama. Pada masyarakat Bengkulu terdapat celako kumali, yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan. di Sumatera Selatan juga banyak terdapat kearifan lokal yang hidup dan dikembangkan oleh masyarakat pendukungnya.

Kearifan lokal sejatinya dapat menjadi identitas bangsa. Dikatakan demikian karena ia mampu menjadi rujukan dan arahan kelompok masyarakat untuk pencapaian keamanan sosial masyarakat.

Dalam proses pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun di Desa Tanjung Aur II ini menurut *Taswin Suhadi*, selaku Kepala Desa mengatakan bahwa tidak ada cara-cara tertentu atau prosedur formal yang dilakukan secara administratif oleh masyarakat yang akan melakukan pembukaan hutan belukar. Melainkan masyarakat ini hanya melakukan suatu pemaberitahuan atau yang sering disebut sebagai kata *pamitan* bahwa si pembuka hutan ini telah melakukan pembukaan hutan belukar, itupun terkadang si pembuka hutan melakukannya dengan tidak kesengajaan karena adanya pertemuan di suatu hajatan yang dilakukan di dalam Desa. Adapun pamitan yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Aur II ini yaitu dengan cara lisan, seperti halnya seorang anak yang meminta izin kepada orang tuanya untuk melakukan sesuatu. Begitu juga dengan pendapat *Warsito* selaku Sekretaris Desa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Desa Tanjung Aur II.

Proses pembukaan hutan belukar menurut masyarakat Serawai merupakan putaran kehidupan sepanjang tahun yang menjadi kebiasaan secara turun temurun dari nenek moyang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah pembibitan (menyiapkan bibit), para petani sudah memikirkan di mana petani ini akan membuka kebun karena sebelumnya masyarakat Tanjung Aur II ini sudah melakukan survey atau mencari lokasi yang cocok untuk membuka lahan kebun.

Bentuk hutan yang akan dikelola dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu (1) hutan yang berasal dari lahan yang pernah dibuka menjadi kebun, kemudian dibiarkan selama beberapa tahun sehingga menjadi belukar kembali; (2) hutan baru, yaitu hutan yang masih baru atau hutan yang belum pernah dibuka atau hutan yang masih belukar belantara. Untuk membuka / mengelola hutan baru biasanya diperlukan serangkaian tahap kegiatan yaitu:

1. *Membali*

Membali adalah menentukan hutan yang akan dibuka, setelah hutan diperoleh diberi tanda *bobalian*. *Bobalian* adalah tanda yang dibuat untuk menyatakan bahwa hutan itu akan digarap, karena itu tidak boleh digarap orang lain. Proses pemilihan hutan didasarkan pada jenis tanah, terkadang juga meminta nasihat supranatural kepada orang yang memiliki pengetahuan tentang keadaan alam atau hubungan dengan roh-roh penunggu hutan tersebut. Hal ini biasanya peladang lebih banyak membuka hutan tua daripada membuka hutan belukar, karena menurut kepercayaan peladang ini

ada pepatah yang mengatakan “*lebih baik gadis dibandingkan dengan janda*”. Peladang lebih banyak memperoleh manfaat dengan membuka hutan tua terutama yang masih subur sehingga hasil produksinya pun lebih baik dan melimpah. Kebiasaan untuk memilih hutan untuk ladangnya adalah mengutamakan hutan tua dan menghadap ke timur atau ke arah matahari terbit, bukan tanah angker atau tanah berpenghuni yaitu makhluk gaib, bukan tanah penyakit, dan bukan tanah milik orang lain atau ada tanda *bobalian*. Masyarakat Serawai juga beranggapan bahwa hutan tua yang belum pernah dijamah oleh manusia (*gimbau*) adalah angker, maka pembukaan hutan ini terlebih dahulu diadakan sedekahan *nasi kunyit (jambar)*.

Adapun pengetahuan lain menurut masyarakat Serawai tentang keadaan tanah yaitu, apabila tanah itu berlapis tanah liat yang berwarna kuning, cepat retak oleh panas dan cepat becek di musim hujan itu tandanya kesuburan tanah rendah. Namun apabila tanah itu berwarna hitam dan tidak punya lapisan tanah liat, tanah itu dianggap subur. Masyarakat Serawai juga mengenal tanaman yang dianggap mempersubur tanah, seperti tanaman kacang-kacangan yang mengandung air, *lepong* (mentimun), dan masyarakat Serawai ini juga mengetahui pula tanaman yang merusak tanah, yaitu kacang tanah dan singkong.

Mencari tanah yang baik untuk dijadikan lahan kebun, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang, yang terdiri dari empat orang atau lebih.

Setelah lokasi hutan yang akan digarap telah didapat, selanjutnya akan diadakan pengukuran batas kebun dengan kebun tetangga, hal ini dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Dalam pemilihan jarak dan batas-batas kebun yang akan dibuka tidak mendahulukan berbatasan dengan keluarga atau tetangga, tetapi batas-batas dipilih secara *basing bae* (sembarang saja) karena menurut masyarakat Serawai hal ini bukan dikarenakan akan timbulnya keburukan, namun dengan berbatasan atau tetangga dengan siapa saja nantinya dalam berkebun maka orang itulah yang akan menjadi keluarga. Bila ada salah satu dari peladang itu yang sakit, maka peladang yang lain juga akan merasakannya, sebagaimana menurut adat masyarakat Serawai yang mengatakan *sekundang setungguan*, bahwa berteman harus setia.

Dalam pembukaan hutan belukar terdapat beberapa pantangan menurut adat suku Serawai yaitu :

- a) *Batas sepit sepanggang*, kebun dua orang bersaudara yang ditengahnya terdapat kebun pendatang. Seperti istilah masyarakat Serawai *ibarat membakar ikan, jika ikan terbakar maka penjepitnya akan terbakar pula*. Keadaan pertetanggaan itu dianggap akan menyebabkan kedua saudara dan pendatang tersebut akan celaka. Ada cara untuk mengatasi keadaan itu, di antara batas kebun harus dibuat jalan dan boleh digarap tetapi jangan ditanam padi.

- b) *Macan merunggu* (macan diam), yaitu kebun dilarang berbatasan dengan hutan; hutan itu harus dibuka.
- c) *Jerat sepintu ngembang bakal*, yaitu dilarang membuka hutan yang di tengahnya terdapat jalan setapak yang sering digunakan orang.

2. *Pembibitan* (menyiapkan bibit)

Setelah lokasi hutan yang akan dibuka telah didapat, maka selanjutnya dilakukan pembibitan atau menanam di polibek atau plastik yang berisi bibit atau biji, sehingga pada waktunya bibit siap ditanam di kebun. Hal ini biasanya masyarakat ini memperoleh bibit dengan cara membeli kepada masyarakat lain yang sudah panen, masyarakat ini pun telah menyiapkan bibit-bibit sawit yang akan dijual untuk digunakan atau ditanam kembali sebagai bibit kepada orang lain.

Pertumbuhan atau selang waktu pembibitan dan penanaman di lahan atau kebun memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga sebelum melakukan proses pembukaan hutan, masyarakat Serawai ini memanfaatkan tanah dengan menanam pohon-pohon besar seperti pohon duren dipinggir-pinggir pembatas jarak antara kebun satu dengan kebun yang lainnya. Selain dari untuk menikmati hasilnya, pohon-pohon itu juga dimaksudkan sebagai tanda bahwa tanah tersebut sudah dimiliki orang lain.

3. *Nebas* (menebas rumput-rumput)

Sebelum penebasan, terlebih dahulu dilakukan upacara *mangkul beumo*, yaitu upacara mulai kerja menggarap hutan yang dilakukan pada hari

pertama menebas, di lahan yang akan menjadi kebun, untuk meminta izin kepada *dewa penguasa tanah dan hutan*.

Menurut kepercayaan, setiap tempat atau benda alam ada penguasanya sendiri, karena itu manusia sebagai makhluk beradab perlu *perbasa* (basa-basi) kepada penguasa tersebut. Bila upacara ini tidak dilakukan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggarapan hutan, atau salah seorang keluarga dari mereka akan sakit sehingga tidak dapat menggarap kebunnya atau yang dapat menimbulkan hambatan dalam penggarapan kebun atau panen tidak berhasil.

Setelah upacara *mangkal beumo*, pada hari itu juga dilakukan proses *nebas* (penebasan), yaitu memotong semak, akar-akar dan pohon yang berdiameter kecil. Pekerjaan menebas ini dilakukan oleh laki-laki, namun jika perempuan ingin membantu penebasan ini tidak ada larangan.

4. *Nebang* (menebang pohon-pohon yang besar)

Setelah penebasan rumput dan pohon-pohon kecil dilakukan, semua pohon besar ditebang tanpa kecuali. Pohon dipilih yang besar, tinggi dan lurus yang jika diperlukan dapat digunakan untuk kayu atau papan *anjung*. Jika saja dahulu zaman nenek moyang, takut untuk menebang pohon yang besar karena dipercayai adanya *penunggu* atau diyakini bahwa pohon tersebut sudah dimiliki atau rumah dari makhluk *gaib*. Namun kepercayaan itu sekarang perlahan sudah luntur, walaupun masih ada yang percaya akan adanya makhluk *gaib* pada pohon-pohon besar tersebut, maka tidak menutup

kemungkinan pada saat melakukan penebangan pohon mereka melakukan ritual-ritual adat yaitu diadakannya sedekahan nasi kunyit.

Adapun penebangan pohon-pohon besar ini dilakukan dengan cara *ngerasayo* (gotong royong), yang membutuhkan kurang lebih tiga hari. Dimana sebelum melakukan penebangan pohon-pohon yang ukurannya tidak terlalu besar, masyarakat terlebih dahulu membuat *tanggo tukisan* atau tangga untuk berdiri. Sedangkan untuk menebang pohon yang lebih besar, masyarakat menggunakan *tango rerincang*. Alat yang digunakan untuk menebang ini adalah *beliung*.

5. *Megheda* (memotong dahan kayu)

Setelah pekerjaan menebang selesai, tahap berikutnya adalah *megheda*. *Megheda* yaitu memotong dahan dan ranting kayu dari pohon yang besar untuk *dighedai* atau ranting diletakkan ditanah dengan maksud untuk dijemur sehingga agar ranting-ranting kayu ini cepat kering, sehingga dapat melakukan tahapan berikutnya atau membakar kayu tersebut lebih cepat.

6. *Nyilap* (membakar kayu yang telah dipotong)

Proses pembakaran ini dilakukan pada saat cuaca panas (tidak hujan) dan dimana kayu-kayu yang tadinya diratakan atau dijemur sudah kering. Namun, jika saja kayu-kayu tersebut belum terlalu kering, maka akan diadakan kembali penjemuran atau *hampaghan* kayu-kayu tersebut selama kurang lebih satu bulan.

Untuk mengetahui cuaca atau keadaan alam yang dianggap cocok untuk melakukan pembakaran, biasanya para pembuka hutan ini melihat dari *bintang mato tahun* atau *petahunan* yang timbul dimusim panas, atau antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli dan sekitaran pertengahan bulan Juli.

Sebelum melakukan pembakaran, terlebih dahulu diadakannya upacara *nyilap* untuk memohon izin kepada penguasa tanah karena akan melakukan pembakaran. Setelah itu proses pembakaran akan dilaksanakan, dimana pada saat pembakara para pembuka lahan harus memperhatikan arah angin, yaitu sumber arah angin (*pangkal angin*) menjadi lokasi awal pembakaran. Karena dimaksudkan angin dapat membantu proses pembakaran sehingga pohon-pohon dan ranting menjadi terbakar semua ditengah hari panas yang terik. Agar api pembakaran tidak meluas ketanah atau hutan yang tidak diinginkan, maka sebelumnya masyarakat melakukan *kekas* (*dikekas* = dibersihkan) kira-kira dua *depo* dari sekeliling batas tanah yang tidak akan dibakar atau bukan miliknya tersebut. Masyarakat ini melakukan pembakaran dengan menggunakan *suluh* yaitu bambu panjang yang disulut api.

Selain itu, untuk menjaga atau waspada akan terjadinya kebakaran pada tanah yang bukan miliknya, biasanya masyarakat ini juga menyiapkan ranting yang masih mempunyai daun. Ranting ini digunakan untuk memadamkan api yang akan merambat ke tanah atau ke lahan yang bukan miliknya. Akan tetapi ada juga para pembuka lahan ini menggunakan *magi*

untuk menahan api tersebut, yaitu berupa pasir yang telah dibacakan *jampi* atau mantera sehingga api tersebut mengikuti arah yang dikehendaki.

7. *Manduak* (mengumpulkan sisa kayu yang belum terbakar)

Setelah selesai melakukan pembakaran hutan, tahap pekerjaan selanjutnya adalah *manduk*. Selama masa *manduk* ini lahan biasanya disebut sebagai *pandukan*. Manduk artinya yaitu mengumpulkan sisa kayu-kayu yang tadinya belum terbakar dan kemudian akan dibakar kembali.

8. *Negak anjung* (membuat pondok)

Negak anjung atau membuat pondok ini biasanya dilakukan pada saat proses manduk telah selesai, agar *anjung* atau pondok ini tidak ikut terbakar.

Pembuatan pondok dilakukan dengan kerja sama, apabila pondok itu ditinggalkan akan dibuat pondok yang baru. Adapun alat yang biasa mereka gunakan yaitu *pisau* (golok), *tukul* (martil), gergaji, namun tidak menggunakan paku tetapi hanya diikat dengan akar *cirian*. Pondok biasanya berukuran 2 x 3 *depo* untuk menghindari gangguan binatang buas dan agar dapat mengawasi kebun dengan lebih baik.

Menurut kebiasaan masyarakat Serawai, membuat pondok biasanya dilakukan pada saat sebelum menanam sebagai tempat menyimpan bibit dan tempat beristirahat serta makan pada waktu akan menanam .

Adapun untuk menjaga kebun biasanya masyarakat Suku Serawai ini menginap di *anjung* kebun tersebut, seandainya pun mereka pulang

kepemukiman Desa dikarenakan untuk membeli persediaan makanan yang mana biasanya mereka membeli persediaan makanan ini di *pekan* atau pasar yang ada hanya sehari dalam seminggu. Ada hari-hari tertentu untuk Desa yang berlainan.

9. *Nugal* (penanaman)

Nugal berasal dari kata dasar *tugal* atau kayu yang ujungnya diruncingkan untuk membuat lubang di lahan, yang akan ditanami . Bibit yang akan ditanam, sebelumnya telah disemai atau ditanam di dalam polibek dan nantinya akan dipindahkan ke lahan kebun. Biasanya yang melakukan *nugal* ini adalah kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan menanam atau memasukkan bibit ke lubang-lubang yang telah dibuat oleh kaum laki-laki.

Penanaman biasanya ditentukan beberapa jarak yaitu sekitar 8 m atau 9 m, agar hasil produksinya menjadi lebih baik dan lebih banyak. Sehingga nilai jualnya pun menjadi lebih tinggi.

10. *Panen* (memanfaatkan hasil).

Pada saat sudah besar atau tua dan buahnya pun berwarna agak kemerah-merahan, itu artinya siap untuk dipanen. Untuk memanen itu sendiri biasanya masyarakat Serawai menggunakan *dodos* yaitu besi yang bermata satu yang akan ditambah kayu untuk mengambil hasil panen yang pohonnya sudah tinggi sehingga sulit untuk dijangkau oleh tangan.

Setelah hasil panen dikumpulkan, masyarakat membawanya ketempat *pecingkau* atau penjual hasil-hasil kebun dari masyarakat setempat.

Adapun manfaat dari hasil panen ini biasanya digunakan oleh petani untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk makan, dan selebihnya akan digunakan untuk membeli keperluan-keperluan rumah tangga.

Menurut teori, tanah dalam hukum adat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: karena sifatnya yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetapi masih bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan. Selain itu karena faktanya yaitu kenyataan bahwa tanah adalah merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dikuburkan, dan yang terakhir merupakan pula tempat tinggal bagi dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh-roh para leluhur persekutuan (masyarakat).

Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa antara persekutuan (masyarakat) hukum adat dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang sangat erat. Hubungan ini bersifat religio-magis. Sifat religio-magis inilah yang menjadi dasar persekutuan memiliki hak untuk menguasai tanah yang duduki, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan

atau pepohonan yang hidup di atas tanah tersebut, serta juga berburu binatang yang hidup di atas tanah tersebut.⁶⁰

B. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Adapun proses pembukaan tanah (hutan belukar) menurut UUPA adalah

Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi :

Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (LN 1997-59) yang berbunyi :

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - a. pengumpulan data dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. penyajian data fisik dan yuridis;
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

⁶⁰ Djamanat Samosir, Op Cit., Halaman 98.

BAB VI

AKIBAT HUKUM DARI PEMBUKAAN HUTAN BELUKAR MENJADI LAHAN KEBUN MENURUT HUKUM ADAT SERAWAI DI KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Menurut Hukum Adat Serawai

Menurut Hukum Adat Serawai, tanah yang telah dibuka dan dikelola secara kontinu lambat laun akan menjadi milik si pembuka hutan yang pertama kali membukanya. Dari hasil wawancara dilakukan hal ini pun sama dengan pendapat kepala desa yaitu *Taswin Suhadi* dan juga *Warsito* selaku sekretaris desa, yang mana menurutnya orang yang telah bersusah payah melakukan pembukaan hutan belukar atau biasa disebut dengan kata *perintis hutan* ini melakukan pengelolaan hutan belukar hingga menjadi suatu lahan kebun mempunyai hak kepemilikan atas tanah yang telah dikelola secara kontinu tersebut. Untuk adanya pengakuan hak milik atas lahan kebun yang telah dikelola ini, masyarakat tidak diharuskan untuk memiliki surat-surat mengenai lahan kebunnya, melainkan cukup dengan beberapa orang saksi yaitu biasanya orang-orang yang berada di sekitar kebun atau *sangkup kebun* (tetangga).

Adapun cara untuk memperoleh surat kepemilikan tanah menurut hukum adat adalah sebagai berikut⁶¹:

1. Untuk penduduk asli dari dalam desa permintaan (izin garap) kepada kepala desa (pasirah) dan pemuka adat.
2. Untuk yang dari luar desa dianjurkan untuk pindah tempat tinggal terlebih dahulu agar menjadi warga desa.
3. Mengurus izin garap
4. Mendaftar (mengisi blanko) formulir untuk mendapatkan surat hak milik adat.
5. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di tambah untuk materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Namun berbeda dengan cara untuk memperoleh surat kepemilikan tanah di wilayah Desa Tanjung Aur II, dimana menurut *Taswin Suhadi* secara administratif cara-cara tersebut tidak dilakukan melainkan pada saat akan melakukan pembukaan hutan belukar hanya dengan melakukan izin (*pamitan*) secara lisan kepada kepala desa setempat. Bahkan dalam pelaksanaannya di lokasi penelitian yaitu Desa Tanjung Aur II, si pembuka hutan belukar meminta izin setelah hutan belukar tersebut sudah dibuka dan dikelola sehingga menjadi suatu lahan kebun . Hal ini menurut hukum adat Serawai hak kepemilikannya adalah sah yaitu milik si pembuka hutan belukar. Karena menurut *Warsito* jenis hutan belukar yang dibuka ini adalah jenis hutan produksi, yaitu hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. dimana jenis hutan ini adalah hutan milik Negara namun berada di wilayah masyarakat adat, sehingga menurutnya dalam penerapannya masyarakat adat mempunyai hak atas

⁶¹ Herawan Sauni, Merry Yono, Andry Harijanto, Budiono, 2005, Loc Cit.

pengelolaan dan kepemilikan hutan belukar tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi:

Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swastantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Menurut *Warsito* hutan-hutan belukar yang dikelola oleh masyarakat adat di Desa Tanjung Aur ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Adapun lahan kebun yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Tanjung Aur II ini pada dasarnya tidak memiliki sertifikat tanah atau dengan kata lain tanah ini tidak terdaftar menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria sehingga tidak ada kepastian hukum.

Namun ada sebagian dari warga masyarakat Tanjung Aur II ini sudah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang mana dalam proses pembuatannya ini diajukan ke kepala desa dan diterbitkan oleh Camat sebagai alas hak atas tanah. Surat-surat tersebutlah yang dijadikan sebagai alas hak dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanahnya.

Bukti kepemilikan hak-hak atas tanah yang dapat diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai alas hak, sungguhpun sebagaimana diuraikan di atas bahwa terhadap alas hak dimaksud dapat

diproses pendaftaran tanahnya melalui konversi atau pengakuan/penegasan hak atas tanah

Surat-surat yang dikategorikan sebagai alas hak atau data yuridis atas tanah pada dasarnya merupakan keterangan tertulis mengenai perolehan tanah oleh seseorang, misalnya saja dengan berupa pelepasan hak bekas pemegang hak, pernyataan tidak keberatan dari bekas pemegang hak tentunya setelah ada ganti rugi. Syarat ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang bunyinya

"sebelum mengajukan permohonan hak atas tanah, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶²

Namun pada saat wawancara kepada informan, tanah yang di daftar masih sebatas SKT yang mana kekuatan hukumnya hanya dibatas Kecamatan saja. Adapun tujuan masyarakat Tanjung Aur II membuat SKT yaitu adanya tujuan tertentu misalnya digunakan sebagai alat transaksi jual beli antar pihak, pengalihan hak dari pewaris kepada ahli warisnya, dan sebagai agunan dalam gadai (*sandau*). Dalam hal inilah yang membuat masyarakat Tanjung Aur II sadar akan pentingnya bukti dari kepastian hukum

⁶² Djoko Walijatun, Persyaratan Permohonan hak, Majalah Renvoy No. 10.34.III, Maret 2006, halaman 65.

Adapun beberapa alasan mengapa suatu lahan kebun yang dimiliki oleh si pembuka hutan belukar, tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional menurut Warsito yaitu :

1. Menurut pemilik lahan kebun, belum pentingnya sertifikat tanah untuk kepentingannya. Karena biasanya sertifikat atau surat tanah ini digunakan sebagai alat bukti dari transaksi jual-beli, untuk gadai dan pengalihan hak warisan
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat setempat mengenai pendaftaran sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional
3. Tidak adanya petugas Prona yang ingin masuk ke lokasi kebun milik masyarakat Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Mahalnya biaya pendaftaran tanah di notaris atau PPAT.

B. Menurut UUPA

Di dalam UUPA menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku bukanlah hukum adat yang murni. Namun hukum adat ini perlu disesuaikan dengan asas-asas dalam UUPA. Demikian ditentukan dalam Pasal 5 UUPA, Hukum adat ini tidak boleh bertentangan dengan :

1. kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa;
2. sosialisme Indonesia;
3. peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA;
4. peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya;
5. unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 19 UUPA dinyatakan sebagai berikut:⁶³

1. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a) pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
 - b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c) pemeberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas social ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Adapun syarat-syarat permohonan hak milik yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yaitu Pasal 8 yang berbunyi:

1. Hak milik dapat diberikan kepada :
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - (1) Bank Pemerintah;
 - (2) Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
2. Pemberian Hak Milik untuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diberikan atas tanah-tanah

⁶³ Supriadi, 2009, **Hukum Agraria**, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 152.

tertentu yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas hak dan batas tanah tersebut, pasal 19 UUPA menugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah yang sangat penting artinya untuk mendapat ketenangan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang mempunyai hak atas tanah. Pendaftaran tanah pertama kali yang meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan, pembukuan tanah, adjudikasi, pembukuan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat memerlukan biaya yang relatif tinggi, sehingga untuk percepatan kegiatan tersebut Pemerintah mendapat pinjaman dari Bank Dunia.

Seiring dengan reformasi di bidang agraria, maka proses pendaftaran hak atas tanah tersebut juga berubah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (*initial registration*) dan pemeliharaan data tanah (*maintenance*). Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.

a. Pendaftaran Tanah Secara Sistematis

Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan. Pendaftaran ini dilaksanakan atas prakarsa

pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN.

b. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

Pendaftaran tanah secara sporadik merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau masal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.⁶⁴

Ada kesamaan antara sistem pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran secara sporadik, yaitu keduanya merupakan pendaftaran yang dilakukan untuk pertama kali. Adapun rangkaian kegiatan dari pendaftarantanah yang dilakukan untuk pertama kali tersebut meliputi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis;
2. Pembuktian hak dan pembukuannya;
3. Penerbitan sertifikat;
4. Penyajian data fisik dan data yuridis;
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen

⁶⁴ Boedi Harsono, 2007, **Hukum Agraria Indonesiap**, Djambatan, Jakarta, Halaman 478.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat serawai di kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu : budaya, system kekerabatan, pendidikan, ekonomi, pengakuan hak atas tanah menurut hukum adat Serawai.
2. Proses pembukaan hutan menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, masih menggunakan hukum adat murni yaitu hukum adat tidak ada proses secara administratif namun hanya secara lisan. Adapun proses kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Aur II ini pada membuka hutan belukar yaitu : *Membali* (mencari lokasi hutan yang akan dibuka), *Pembibitan* (menyiapkan bibit), *Nebas* (menebas rumput-rumput), *Nebang* (menebang pohon-pohon yang besar), *Megheda* (memotong dahan kayu), *Nyilap* (membakar kayu yang telah dipotong), *Manduak* (mengumpulkan sisa kayu yang belum terbakar), *Negak anjung* (membuat pondok), *Nugal* (penanaman), dan *Panen* (memanfaatkan hasil).

3. Akibat hukum dari proses pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai di Desa Tanjung Aur II ini adalah sah menurut hukum adat serawai menjadi hak milik si pembuka hutan belukar tersebut. Sebagai bukti alas haknya adalah SKT.

B. Saran

1. Hendaknya pihak pemerintah atau hukum Nasional mengadakan sosialisasi tentang hukum yang mengatur tentang tanah yaitu Undang-Undang Pokok Agraria kepada masyarakat masyarakat Tanjung Aur II khususnya yang tidak pernah tahu akan arti hukum.
2. Sosialisasi dari Pemerintah mengenai pentingnya pendaftaran hak atas tanah sebagai kekuatan dan/atau kepastian hukum, perlu diadakan di Desa Tanjung Aur II.

Daftar Pustaka

- Chalik, Alex Abdul, *Laporan Penelitian Struktur dan Fungsi Lahan Dalam Sistem Perladangan Berpindah Orang Serawai Si Bengkulu Selatan*, Bengkulu, UNIB, 2005.
- Gautama, Sudargo, dan Ellyda T. Soetijarto, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) Dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya (1996)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Geertz, Clifford, *The Impact Of The Concept Of Culture On The zconcept Of Man, Dalam The Interpretation Culture : Selected Essays*, New York : Basic Book Hal 619-638, 1973.
- Harijanto, Andry, Merry Yono, Boerhandra dan Herawan Sauni, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Bengkulu, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2007.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, 2007.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanny*, Jakarta, Djambatan, 1997.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indosiap*, Jakarta, Djambatan, 2007.
- Hatta, Moch *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara kesatuan Hukum*, Yogyakarta, Media Abadi, 2005.
- Kartawidjaja, Moch. Hidjazie, *"Hukum Dasar Kita dan Hukum Tidak Tertulis"*, Bandung, PT. Eresco, 1995.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, PT. Dian Rakyat, 1967.
- Louis, L.F. *"An Investigator's Guide To Workplace Culture Dalam Organisational Culture"* (Editor P. J. Frost, Lf. Moore, M. R. Louis Loundberg dan J. Martin) Beverly Hill : Sage Publication, 1985.
- Mubiyarto, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Yoygakarta: Aditya Media-P3PK, Universitas Gadj Mada, 1994.

- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, Prenada Media, 2003.
- Parlindungan, A.P, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Bandung, Alumni, 1983.
- Pospisil, Leopold, *Anthropological Of Law : A Confarative Theory*, New York : Harper and Row Publisher, 1971.
- Rato Dominikus, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. Yogyakarta ; LaksBang PRESSindo, 2011.
- Saleh, Wantjik, *Hak Anda Atas Tanah*, Cetakan ke 4, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indoneisa Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2013.
- Sauni Herawan, Merry Yono, Andry Harijanto, Budiono , *Laporan Penelitian Dasar Perilaku Masyarakat Dalam Meramba Hutan Lindung Bukit Raja Mandara Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan*, Bengkulu, UNIB, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3, Jakarta, UI Press, 1986.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pardnya Paramita, 1986.
- Sudiyat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat*. Cetakan Ke-1; Yogyakarta; Liberty, 1978.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty, 1981.
- Sumardjono, Maria S.W., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Jakarta, Kompas, 2008.
- Suparlan, Parsudi, *Kebudayaan dan Pembangunan Dalam Majalah Dialog*, No 21, Tahun XI, hal 2-19, 1988.

Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cetakan ke 1, Jakarta, Rineka Cipta, 2003

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2012.

Tjahjono, Purwadi Eka, Panji Suminar, dan achmad Aminudin, Laporan Penelitian Fundamental Tahun Ke II. *Revitalisasi Elemen Modal Sosial (sosial energy) Sebagai Media Transmisi Sosial (sosial energy) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat*, Bengkulu, UNIB, 2009.

Walijatun, Djoko, *Persyaratan Permohonan Hak*, Majalah Renvoy No. 10.34.III, 2006

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Bandung; Penerbit Alumni, 1979.

Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 9 Tahun 1973

Keppres Nomor 55 Tahun 1993

Oendang-Oendang Adat Lembaga Onderafdeelingen

Oendang-Oendang Simboer Tjahaja

Perda Pemberlakuan Hukum Adat Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003.

S.75/Menhut-II/2004

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960, LN 1960/104)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Internet

www.bengkuluselatankab.bps.go.id

<http://www.sumeks.co.id>

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN PINO RAYA
DESA TANJUNG AUR II

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 593 / 354 / CPR / 2 / 2013

Yang beranda dengan dibawah ini Kepala Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

1. Berdasarkan surat pernyataan tanggal , - - 2013 (terlampir) setelah diadakan pemeriksaan dan peninjauan seperlunya bahwa sebidang Tanah seluas . M2 (Sudah / belum diukur oleh petugas) adalah benar-benar Kepunyaan / penguasaan .

Nama : Sipriatman
Umur / tanggal lahir : 47, 521 12-01-1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dm.
Desa TG. AUR Kec. PINO RAYA
Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Batas-batasnya

Utara berbatasan dengan Tanah Lahan
Selatan berbatasan dengan Tanah Eyau
Timur berbatasan dengan Tanah Danin
Barat berbatasan dengan Tanah Sipriatman

Bahwa benar Tanah tersebut meraka lunasi berdasarkan Dipersehatkan Juri Yati

3. Tanah tersebut benar-benar dikuasai dan dikerjakan oleh yang bersangkutan sesuai terus menerus sampai sekarang .
Ditatas Tanah tersebut terdapat Kayu Rakyat
Tanah tersebut akan / telah dipergunakan untuk Lahan Perkebunan Sawit
4. Tanah tersebut tidak terangkut pada pihak lain .
5. Surat keterangan ini di keluarkan atas permintaan yang bersangkutan berhubung tanah tersebut akan di Sertifikasikan / Dimiliki sendiri .

Tanjung Aur II , 11 - 2013



Nomor : 593 / 354 / CPR / 2 / 2013
Tanggal : 11 / 11 / 2013



NIP: 19670416 198601 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DIKASMAN
Tempat / tanggal lahir : Desa Air 12-01-1968 (45 Tahun)
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tanjung Ayu
Kecamatan : Kec. Mangrove
Kabupaten : Bengkulu Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa menguasai, memiliki, Memakai sedang Tanah
Pertanian / Pertanian yang terlekat di :

Desa : Tanjung Air II
Kecamatan : Palo Raya
Kabupaten : Bengkulu Selatan

Luas Tanah : 1000 M², panjang m, dan lebar M, yang sudah / belum
diukur oleh petugas, Sekit Tanah terlekat:
Batas-batas Tanah tersebut sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Tanah : Lahan
Selatan berbatasan dengan Tanah : Ortan
Timur berbatasan dengan Tanah : Pahrin
Barat berbatasan dengan Tanah : DIKASMAN

Adapun riwayat pengguna, Pemilik / Pemakai Tanah tersebut saya kuasai berdasarkan
.....

Selama penguasaan / pemakaian atas tanah tersebut tidak pernah ada pihak lain yang
mengajukan keberatan baik menguasai hak maupun batas-batasnya.
Dan tidak termasuk pada lokasi proyek pemerintah / kepengantarannya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan
oleh pihak - pihak yang berbatasan, apabila di kemudian hari ternyata tidak benar, saya
bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Air II, 11 - 11 - 2013

Yang membuat pernyataan


DIKASMAN

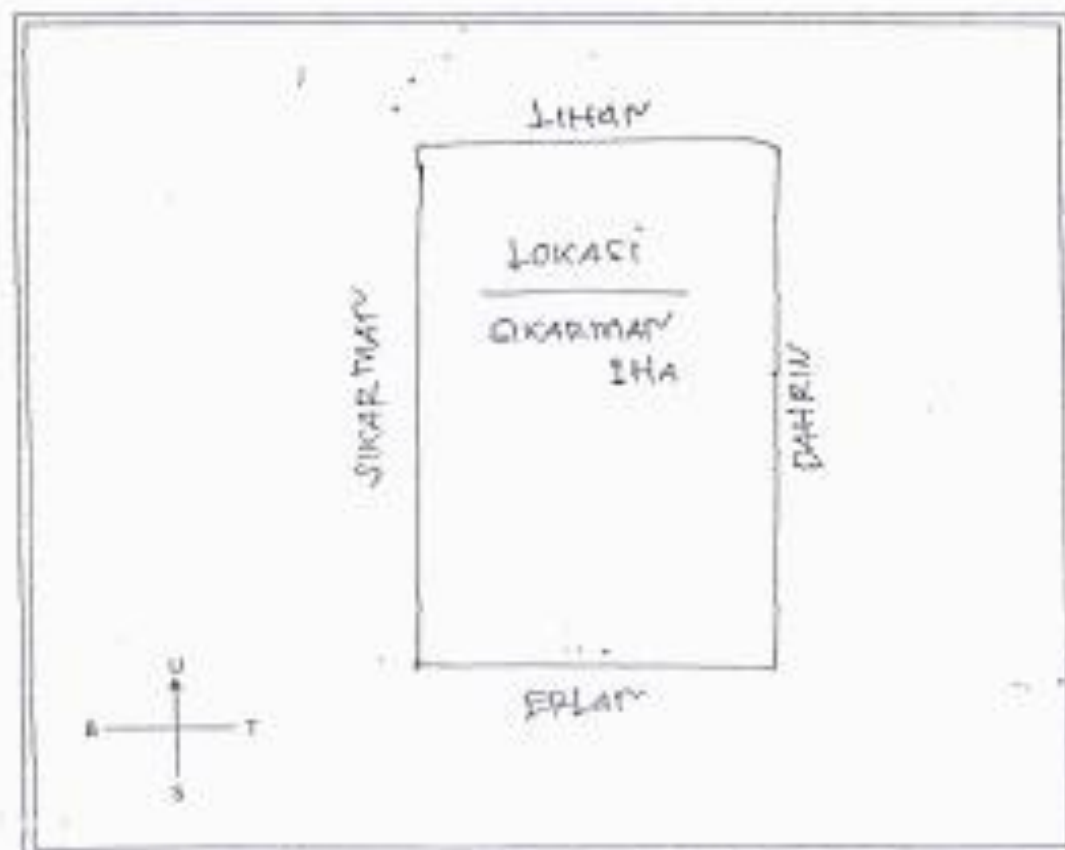
SAKSI - SAKSI

Utara : Lahan
Selatan : Ortan
Timur : Pahrin
Barat : DIKASMAN



PETA LAHAN

Nama Pemilik Lahan : SIKARTMAN
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat Pemilik Lahan : Des. Kec.
Kabupaten
Lokasi Lahan : Desa Tanjung Aur II
Kecamatan Pulo Raya
Kabupaten Bengkulu Selatan



Batas-batas lahan

- Sebelah Utara
- Sebelah Selatan
- Sebelah Timur
- Sebelah Barat

LITAN
ERLAN
DAHRIAN
SIKARTMAN

Pemilik lahan

Sikartman
SIKARTMAN



ERIKSSON BENGTSSON
KARLSTADEN UNIVERSITÄT DELFTAH

[illegible][illegible]

See Appendix 2 for signature



1. **RESEARCHER'S NAME:** [Name]
 2. **RESEARCHER'S ADDRESS:** [Address]
 3. **RESEARCHER'S PHONE:** [Phone]
 4. **RESEARCHER'S FAX:** [Fax]
 5. **RESEARCHER'S E-MAIL:** [Email]
 6. **RESEARCHER'S WEBSITE:** [Website]

KARTU TANPA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

P. 1101.084/517



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprovbingkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com

BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503 / 7.a / 2744 / KP2T / 2013

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Nomor : 2593/ UN.30.4/ PL/ 2013, Tanggal 16 Desember 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.
Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 20 Desember 2013

Nama / NPM	: Destri Zeki / B1A110022
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Pembukaan Hutan Belukar Menjadi Lahan Kebun Kelapa Sawit Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
Daerah Penelitian	: Di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 20 Desember 2013 s/d 20 Januari 2014
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 20 Desember 2013



KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU
KP2T
Ir. HENDRY POERWANTRISNO
PEMBINA TK.I
NIP. 19620921 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Kesbang Pol Kab. Bengkulu Selatan
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN SERSAN M. THAHA MANNA BENGKULU SELATAN

REKOMENDASI

Nomor : 070/287/KBP/2013.

TENTANG PENELITIAN

1. Dasar Rekomendasi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/7.a/2744/KP2T/2013, tanggal 20 Desember 2013. Perihal Permohonan Izin Penelitian Saudara :

Nama : DESTRI ZEKI

NPM : B1A110022

Dengan Judul : "Pembukaan Hutan Belukar Menjadi Lahan Kebun Kelapa Sawit Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

Daerah Penelitian : Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

Lama Penelitian : 23 Desember 2013 s/d 24 Januari 2014

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

2. Pada Prinsipnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan tidak berkeberatan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian dimaksud dengan catatan/ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Setelah selesai melaksanakan Penelitian/Survey agar segera melapor kembali ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.

Guna kelancaran pelaksanaan Penelitian/Survey tersebut, diharapkan kepada Bapak/Ibu Kepala Instansi/Wilayah yang menjadi tempat Penelitian kiranya dapat membantu pelaksanaannya.

Demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manna, 23 Desember 2013

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkulu Selatan



Hi. SRIGUSTI SABANA, SH
Pembina TK I NIP. 19640826 199503 2 001

Tembusan :

- Yth. Bupati Bengkulu Selatan
- Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
- Yth. Camat Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN PINO RAYA

Jalan Raya Kelutum KM. 13 No. - Telp. - Bengkulu Selatan 38572

Nomor : 300/501/CPR/XII/2013
Lamp. : -
Perihal : IZIN PENELITIAN

Pasar Pino, 24 Desember 2013
Kepada Yth
Dekan Fakultas Hukum UNIB
Bengkulu
di

Bengkulu

Sehubungan dengan Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 070/287/KBP/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang penelitian, maka pada prinsipnya kami mengizinkan untuk melaksanakan penelitian dengan judul :

“Pembukaan Hutan Belukar Menjadi Lahan Kebun Kelapa Sawit Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan”, kepada :

Nama Mahasiswa : DESTRI ZEKI
NPM : B1A110022
Daerah Penelitian : Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan
Waktu Penelitian : 23 Desember 2013 s/d 24 Januari 2013
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Demikian surat izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bengkulu Selatan
2. Yth. Kepala Kantor KESBANGPOL B/S
3. Yang Bersangkutan